

## PERTEMUAN MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK SENTRAL G20

Lisbet

### Abstrak

*Pada tanggal 15-16 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali, diadakan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governor) kelompok negara G20 yang ke-3 dalam Presidensi G20 Indonesia. Tulisan ini membahas peran Presidensi G20 Indonesia dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20. Meskipun tidak menghasilkan komunike, tetapi pertemuan ini mencapai Chair's Summary. Dari 14 paragraf Chair's Summary, 12 berisi kesepakatan, namun 2 paragraflainnya menyatakan hal-hal yang tidak disepakati bersama. Peran Presidensi G20 Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa 14 paragraf Chair's Summary yang memuat kesepakatan mengupayakan pemulihan ekonomi berkelanjutan dapat diimplementasikan. Di samping itu, Parlemen Negara-negara G20 (P20) sebagai mitra pemerintah, diharapkan ikut mengawal dan mengawasi implementasi hasil-hasil pertemuan G20.*

### Pendahuluan

Pada tanggal 15-16 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali, telah diadakan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (*Finance Ministers and Central Bank Governor*) kelompok negara G20 yang ke-3 dalam Presidensi Indonesia. Pertemuan membahas 7 agenda utama, yakni ekonomi global dan risiko, kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, permasalahan sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional. Pertemuan

ini merupakan lanjutan dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sebelumnya.

Pertemuan pertama diadakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Februari 2022 secara Hibrid, menyepakati keringanan utang negara miskin sebagai kunci ketahanan dan stabilitas dunia menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, pada pertemuan pertama ini telah tercapai komunike mengenai penanggulangan utang sebagai jalan bagi negara-negara miskin untuk keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan



akibat pandemi Covid-19.

Pertemuan kedua di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 20 April 2022, menyepakati peran penting keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang inklusif, tangguh dan ramah lingkungan (*green*). Pada pertemuan ini juga dibahas pencapaian agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan agar sejalan dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) dalam *Paris Agreement*.

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-3 ini menyepakati pentingnya penguatan kerja sama global untuk menjaga stabilitas fiskal, moneter dan sistem keuangan. Penguatan kerja sama penting agar dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai masalah perekonomian global (sebagaimana tercantum dalam 14 paragraf *Chair's Summary*).

Karena ada 2 paragraf dalam *Chair's Summary* yang isinya tidak mencapai kesepakatan, maka pada pertemuan ke-3 tersebut tidak menghasilkan komunikasi, yang merupakan konsensus bersama seluruh anggota G20, tanpa kecuali. Hal ini sangat disayangkan, karena pada waktu krisis finansial global pada tahun 2008-2009, G20 telah berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap persoalan keuangan global. Saat ini G20 diharapkan dapat berperan kembali saat Presidensi G20 dipegang Indonesia. Tulisan ini membahas secara singkat peran Presidensi G20 Indonesia dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang ke-3.

### **Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Ke-3**

Agenda pertama pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-3 ini adalah perkembangan

ekonomi dunia. Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis pangan dan energi serta dampak inflasi global yang sangat mengancam pemulihan ekonomi. Agar pemulihan ekonomi menjadi lebih stabil maka diperlukan kerangka kerja, baik dari segi fiskal, moneter, maupun sistem keuangan. Jika pemulihan ekonomi dapat teratasi maka akan tercapai perekonomian yang lebih berkelanjutan.

Krisis global terkait pangan dan energi memiliki dampak langsung pada kemampuan negara miskin untuk mengatur fiskal. Dalam jangka pendek, krisis ini harus direspons dengan langkah cepat. Sedangkan dalam jangka panjang, langkah konkret diperlukan secara berbarengan dengan upaya mengatasi perubahan iklim. Untuk mengatasi krisis global tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 telah menyepakati perlunya memperkuat kerja sama global.

Salah satu bentuk penguatan kerja sama global adalah pembentukan dan penguatan *Financial Intermediary Fund (FIF) for Pandemic Prevention Preparedness and Response*. Pembentukan FIF ini merupakan salah satu agenda penguatan arsitektur kesehatan global dan upaya merespons pemulihan pascapandemi. FIF juga dibentuk untuk membantu memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi guna tindakan pencegahan serta mengantisipasi jika di masa mendatang kembali terjadi pandemi.

Sampai saat ini, FIF telah mengumpulkan dana sebesar US\$1,28 miliar (Rp18,94 triliun), naik sebesar US\$0,18 miliar jika dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Dana ini berasal dari Amerika Serikat, Komisi Uni Eropa, Jerman, Singapura, Inggris, *Welcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation* serta Indonesia (Republika, 18 Juli 2022). Pada saat pertemuan tersebut, sejumlah negara juga menyusul mengumpulkan dana FIF

ini, seperti Italia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Meskipun, tata kelola FIF saat ini masih dalam tahap diskusi, namun diharapkan tahun ini FIF sudah dapat diluncurkan.

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-3 juga menghasilkan kesepakatan untuk mendorong koordinasi dalam rangka membantu kelompok negara berpenghasilan rendah. Kelompok negara tersebut menghadapi segala dampak krisis, mulai dari kerawanan pangan dan keterbatasan energi, inflasi tinggi, hingga infrastruktur keuangan yang tidak kuat. Situasi utang yang terus memburuk di beberapa negara berpenghasilan rendah membawa dampak politik parah di negara-negara tersebut.

Untuk mengatasi utang tersebut, maka negara-negara G20 bersepakat untuk menekankan pentingnya komitmen bagi kreditur, baik swasta maupun bilateral agar memberikan perlakuan utang yang menyesuaikan. Kreditur diminta memastikan pembagian beban yang adil, sejalan dengan prinsip kesetaraan. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan semua kreditur bilateral dapat mengambil tindakan cepat dalam menanggapi permintaan kelompok negara-negara berpenghasilan rendah untuk penanganan utang.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral juga menyerukan komitmen dan kesediaannya untuk memenuhi kontribusi sukarela sebesar US\$100 miliar untuk negara-negara yang paling membutuhkan (Republika, 18 Juli 2022). Saat ini, banyak negara yang memiliki kemampuan terbatas dalam mengatasi tantangan struktural jangka panjang, yang menimbulkan risiko makro ekonomi, termasuk yang berasal dari pandemi Covid-19 maupun dari perubahan iklim. Sementara untuk *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), G20 perlu

memastikan kumpulan kontributor yang luas untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya.

Tidak hanya itu saja, G20 juga bersepakat kembali menegaskan komitmen untuk mempertahankan jaring pengaman keuangan dari sisi moneter. komitmen ini menjadi kabar baik bagi negara-negara yang membutuhkan. Apalagi, G20 juga menyambut janji anggotanya yang akan memberikan bantuan dana sebesar US\$73 miliar melalui penyaluran *Special Drawing Rights* (SDRs) atau kontribusi yang setara (Republika, 18 Juli 2022).

Kesepakatan lainnya dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-3 adalah mengarahkan digitalisasi agar dapat memperluas inklusi keuangan. G20 juga bersepakat agar layanan jasa keuangan bisa menyentuh usaha mikro, kecil dan menengah serta kaum rentan. Di sela-sela pertemuan tersebut, lima negara anggota ASEAN bersepakat mengembangkan sistem pembayaran lintas negara. Kelima negara tersebut, antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia.

Gubernur Bank Sentral juga bersepakat mematangkan konsep mata uang digital bank sentral (*Central Bank Digital Currency*). Rancangan CBDC ini digunakan untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas batas. CBDC dapat dirancang untuk memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara tapi tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, bahkan dapat digunakan untuk mitigasi dampak negatif dari aset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif.

## Peran Indonesia

Dalam Presidensi G20 Indonesia, Indonesia berperan sebagai jembatan komunikasi bagi setiap negara anggota untuk mendiskusikan sejumlah persoalan

dunia. Saat ini, dunia memerlukan lebih banyak komunikasi dan kerja sama, bukan perang. G20 perlu meningkatkan semangat kerja sama global yang berkomitmen pada pemulihan ekonomi. Kerja sama tersebut amat penting untuk mencegah perekonomian dunia semakin memburuk.

Indonesia, sebagai Presiden G20, dapat berperan mendorong negara-negara G20 membuat langkah konkret sebagai bentuk respons menghadapi ancaman krisis pangan dan energi dunia. Krisis ini telah membuat sejumlah negara berpotensi mengalami resesi. Berdasarkan survei dari *Bloomberg*, dapat diketahui bahwa probabilitas resesi di Asia mengalami peningkatan, tetapi masih kecil jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat dan Eropa.

Untuk Indonesia, kemungkinan terjadinya resesi hanya sebesar 3%. Ini menunjukkan, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang dapat bertahan di tengah kondisi krisis. Untuk mengatasi krisis diperlukan konsensus. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, G20 sebagai forum internasional harus mencapai konsensus yang dapat diimplementasikan dengan cepat sehingga dapat menunjukkan peran kuat dan signifikan. Dengan demikian G20 memiliki kontribusi terhadap perekonomian global.

Indonesia sebagai Presiden G20 juga dapat mengarahkan negara-negara anggota G20 untuk menghindari respons kebijakan yang kontraproduktif, seperti larangan ekspor dan menimbun pangan yang membuat harga semakin naik. Arahan ini penting, karena setiap negara anggota punya kepentingan nasional yang harus diperjuangkan. Contoh, persoalan larangan ekspor telah menjadi perhatian Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan. Menteri Al-Jadaan meminta negara anggota G20 untuk mengevaluasi kebijakan larangan ekspor terhadap negara lain karena dapat berpengaruh

terhadap kenaikan harga barang di sektor pertanian. G20 perlu mendukung sistem dagang yang bersifat terbuka karena tingginya harga barang di sektor pertanian dapat menyebabkan krisis pangan yang berkepanjangan. Selain itu, G20 perlu meningkatkan kerangka regulasi dalam rangka memperkuat keamanan pangan agar arsitektur di sektor pertanian dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan data dari Bank Dunia, per Juni 2022 ada 310 kebijakan dagang di 86 negara yang berpengaruh terhadap harga pangan dan pupuk dunia (*Republika*, 16 Juli 2022).

Di samping itu, G20 juga perlu memberikan bantuan finansial bagi negara-negara yang membutuhkan. Kenaikan harga komoditas dan krisis Rusia-Ukraina telah memperburuk laju inflasi serta meningkatkan ketidakstabilan sosial. Bank Dunia memperkirakan, harga minyak mentah telah meningkat 350% dalam dua tahun sejak April 2020. Bahkan, ada dua hari sejak awal pandemi di Bulan April 2022 di mana semua harga nol bahkan sampai negatif. Sementara itu, pada Juni 2022, harga gas alam di Eropa meningkat hingga sebesar 60% hanya dalam dua pekan. Peningkatan harga ini memberikan dampak besar bagi sejumlah negara seperti Sri Lanka, Ghana, Peru dan Ekuador (*Republika*, 16 Juli 2022).

Terkait krisis Rusia-Ukraina, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengemukakan bahwa perang merupakan sebuah kemunduran dalam upaya dunia mengentaskan kemiskinan. Menurut Yellen, Rusia telah menjadikan keamanan pangan sebagai senjata perang dengan cara menghancurkan berbagai fasilitas pertanian di Ukraina.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ini, merupakan forum untuk membahas kondisi ekonomi global sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan

geopolitik. Urusan menjaga keamanan dan ketertiban dunia merupakan tanggung jawab PBB. Dari 14 paragraf Chair's Summary, terdapat 12 paragraf yang disepakati bersama dan dua paragraf yang isinya terkait hal yang belum disepakati bersama, seperti dampak peperangan terhadap perekonomian dunia. Parlemen negara-negara G20 (P20) yang juga akan mengadakan pertemuan tingkat tingginya diharapkan mengeluarkan kesepakatan untuk mendukung hasil-hasil KTT G20.

### Penutup

Krisis Rusia-Ukraina bisa saja dilihat sebagai persoalan internal bagi kedua negara. Namun, keberadaan Ukraina sebagai entitas yang cukup penting di perbatasan dengan Rusia, tidak saja memiliki nilai strategis bagi Rusia, tetapi juga bagi negara-negara Eropa Barat, sehingga krisis Ukraina pun mengundang kepentingan banyak pihak, termasuk AS yang tergabung dalam NATO bersama negara-negara Uni Eropa. Krisis Rusia-Ukraina yang belum menemukan penyelesaiannya hingga kini, setidaknya hingga Februari 2022, menimbulkan keprihatinan internasional mengingat perang atau krisis terbuka sangat berpotensi terjadi jika para pihak yang berseteru tidak bisa mengendalikan diri lagi. Akhir episode dari krisis Rusia-Ukraina ini belum bisa diprediksi secara jelas, karena hasilnya tetap bergantung dari upaya para pemimpin, kesepakatan kedua kubu, serta ego pertahanan masing-masing yang dapat saja meledak hingga berakibat krisis.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk terus mengupayakan penyelesaiannya secara damai, melalui dialog dan pendekatan diplomasi, sehingga kekhawatiran akan munculnya perang dunia baru tidak terjadi. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional dan dengan politik luar

negerinya yang bebas aktif, perlu ikut mengambil peran untuk mengupayakan solusi terbaik bagi penyelesaian krisis Rusia-Ukraina. Karena krisis yang terus berlangsung, pada akhirnya akan merugikan banyak pihak, tidak saja negara-negara Eropa, tetapi juga negara-negara di kawasan lainnya. Hubungan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan Rusia dan Ukraina akan terganggu karena krisis yang berkecamuk di kawasan Eropa Timur tersebut. Hubungan yang terganggu tersebut bisa mencakup kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi rakyat di masing-masing negara.

Oleh karena itu pula, parlemen sebagai representasi rakyat perlu juga menyuarakan pentingnya penyelesaian damai dalam mengatasi krisis yang terjadi dalam hubungan Rusia dan Ukraina. Berbagai pertemuan forum antar-parlemen, terutama forum antar-parlemen tingkat global, sudah seharusnya menyuarakan dan mendorong pentingnya krisis yang terjadi di Ukraina diselesaikan secara damai. Pertemuan forum Antar-Parlemen Sedunia (*Inter-Parliamentary Union*) ke-144 yang telah diselenggarakan di Bali pada Maret 2022, juga menyuarakan pentingnya krisis di Ukraina untuk diatasi, karena krisis tersebut belum berhasil dicapai solusi damainya.

### Referensi

- "G-20 Sepakati Penguatan Kerja Sama Atasi Krisis", *Kompas*, 18 Juli 2022, hal. 10.
- "G-20 Ajak Bantu Negara Penghasilan Rendah", *Republika*, 18 Juli 2022, hal. 7.
- "Hasil FMCBG ke-4 Jadi Poin Penting KTT G-20", *Media Indonesia*, 25 Juli 2022, hal. 11.
- "IMF Berharap pada Kepemimpinan RI di G20", *Media Indonesia*, 18 Juli 2022, hal. 10.

"Indonesia Serukan G20 Jembatani Diskusi Global", *Kompas*, 16 Juli 2022, hal. 9.  
Kuncahyono, Trias, "Diplomasi Jokowi dan G20", *Kompas*, 20 Juli 2022, hal. 7.  
"RI Dorong Konsensus Atasi Krisis", *Republika*, 16 Juli 2022, hal. 1.  
"Pertemuan G20; Saatnya Menjahit

Semangat Kerja Sama", *Kompas*, 21 Juli 2022, hal. 9.  
"Presidensi G20 Jalur Keuangan Jawab Lima Isu Strategis Global", *Kompas*, 25 Juli 2022, hal. 3.



Lisbet  
*lisbet.sihombing@dpr.go.id*

Lisbet, SIP., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Nasional pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia" (2014), "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" (2015), dan "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat IndonesiaMalaysiaPada Era Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" (2017)

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.